

barel tidak mengganggu target inflasi akhir 2006 yang sekitar 7-9% dan proyeksi *BI rate* sekitar 11-11,5%. Kecuali jika pemerintah merespons kenaikan harga minyak dunia itu dengan menaikkan tarif listrik dan transportasi.

Namun, kata Anton, sektor industri jelas terpengaruh oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Kenaikan harga minyak dunia sebesar 25% atau naik dari US\$ 60 menjadi US\$ 75 per barel akan menaikkan biaya listrik dan BBM sekitar 6-7% bagi rata-rata seluruh industri. Itu berarti ada kenaikan *cost* sebesar 1,4%. Kondisi ini membuat industri menaikkan harga barang produksi sekitar 5-6%.

"Jika kenaikan harga barang hasil produksi sekitar 10%, saya kira tidak akan berdampak cukup signifikan terhadap inflasi," kata Anton.

Fauzi Ichsan menilai, kenaikan harga minyak dunia saat ini hanya sementara akibat spekulatif. Ia memperkirakan, harga minyak dunia cenderung turun ke US\$ 66 pada akhir tahun karena kondisi perekonomian dunia yang masih lesu. Karena itu, pemerintah tak perlu menanggapi dengan menghapus seluruh subsidi. "Jika BBM dan TDL tidak naik sampai akhir 2006, saya perkirakan inflasi sangat mungkin mencapai 7,3% sehingga *BI rate* berada pada kisaran 11-11,5%," papar Fauzi.

Namun, Kurtubi berpendapat, rata-rata harga minyak pada tahun ini mencapai US\$ 70 per barel. Bila pemerintah menetapkan asumsi harga minyak pada APBN-P 2006 tetap US\$ 60, hal itu jelas akan menaikkan subsidi APBN. Namun, pemerintah bisa mengatasinya dengan meningkatkan penerimaan pajak, dan menggalakan energi alternatif. "Saya kira, pemerintah harus menghindari utang," kata dia.

Hendri Saparini menilai, pemerintah tak perlu terlalu responsif terhadap kenaikan harga minyak dunia saat ini. Kenaikan defisit yang diakibatkannya tidak perlu dijawab dengan pengurangan subsidi, apalagi menaikkan harga BBM. Untuk menutupi defisit, pemerintah bisa mencari sumber pembiayaan lain atau mereformasi impor BBM.

Menurut Aviliani, kenaikan harga minyak dunia pasti akan menaikkan defisit APBN. Pilihan pemerintah adalah menghapus subsidi yang berarti menaikkan harga BBM, tarif listrik, dan angkutan atau menambah utang, dari luar atau dalam negeri melalui penerbitan SUN. "Karena pilihan pertama amat riskan, pemerintah tampaknya akan memilih menambah utang," kata dia.

(c85/c78)

Cina dan India, telah menyebabkan meningkatnya permintaan minyak dari negara tersebut. Tren kenaikan harga minyak mentah ini juga disebabkan oleh kecemasan pasar terhadap menurunnya *spare capacity* produksi minyak dunia.

Peningkatan harga minyak mentah internasional tersebut, ujar Menkeu, turut meningkatkan harga rata-rata Indonesian Crude Oil Price (ICP) secara signifikan. Dalam laporan pelaksanaan APBN 2006, realisasi rata-rata harga minyak mentah internasional pada semester I diperkirakan sebesar US\$ 63,12 per barel atau lebih tinggi US\$ 6,12 per barel dibandingkan asumsi APBN 2006 sebesar US\$ 57 per barel.

Sementara itu, dalam RAPBN-P 2006 asumsi harga minyak mentah ditetapkan US\$ 60 per barel dan untuk RAPBN 2007 sebesar US\$ 57-65 per barel.

#### **Inflasi dan *BI Rate***

Sementara itu, para ekonom berpendapat, merespons kenaikan harga minyak mentah dunia dengan kenaikan harga BBM, tarif listrik dan angkutan jelas akan berdampak signifikan terhadap inflasi dan suku bunga.

Ekonom Citibank Anton Guna-wan berpendapat, kenaikan harga minyak dunia hingga US\$ 75 per

MONITOR BERITA

<input checked="" type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input checked="" type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	<b>JUL</b>	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31											
HALAMAN: 7											TAHUN 2006



**"Pemerintah akan menetapkan wilayah tambang sebagai pencadangan negara yang akan dikelola BUMN."**

Menteri ESDM Purnomo Yusglantoro

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE:  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 6

TAHUN 2006

## Target Produksi Antam Terhambat FeNi III

### ● ANALISA SAHAM

EMITEN plat merah PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengumumkan masalah kebocoran di smelter FeNi III yang terjadi 1 Juli. Sehingga smelter tersebut harus di-shutdown untuk perbaikan selama tiga bulan. Padahal FeNi II juga mengalami masalah sehingga dilakukan shutdown.

Analisis Trimegah Securities, Sebastian Tobing, dalam risetnya di Jakarta, kemarin mengungkapkan, akibat peristiwa itu Antam telah menurunkan target produksi dari 19.000 ton menjadi 13.000-16.000 ton. "Peristiwa ini menunjukkan

kinerja pengawasan yang kurang memuaskan dari pihak manajemen perseroan," ujarnya.



Dia memaparkan, Trimegah juga telah menurunkan target produksi dari 21.625 ton menjadi 14.625 ton, dengan asumsi FeNi III bisa dapat beroperasi

kembali pada Oktober 2006. Walaupun penjualan dari FeNi III berkurang, namun perseroan dapat menjual dalam bentuk bijih saprolite.

Trimegah juga memperkirakan produksi bijih saprolite tahun ini mencapai 3,5 juta ton dan pembelian bijih saprolite dari tambang Inco di Pomalaa sebesar 1 juta ton. Dengan diturunkannya target produksi, perseroan dapat menjual 525.000 ton lebih banyak bijih saprolite.

"Sehubungan dengan berita ini, kami akan mereview target price. Kami merekomendasikan hold terhadap saham Aneka Tambang dengan target harga Rp 4.625," ujarnya. ● 03B

MONITOR BERITA

<input checked="" type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>	
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input checked="" type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN <u>JUL</u> AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN: 15		TAHUN 2006

# Pemerintah tetapkan area cadangan bahan tambang

Oleh BAMBANG DWI DJANUARTO  
*Bisnis Indonesia*

JAKARTA: Pemerintah akan menetapkan sejumlah wilayah pertambangan sebagai pencadangan negara yang akan dikelola BUMN pertambangan untuk menjamin pasokan dalam negeri dan konservasi tersedianya cadangan masa depan.

Wilayah yang masuk dalam pencadangan negara tidak boleh diproduksi hingga pemerintah memutuskan pencadangan negara dapat digunakan berdasarkan kebutuhan nasional.

Konsep wilayah pencadangan negara telah disepakati oleh pemerintah dan DPR masuk dalam Rancangan Undang-Undang Pertambangan, Mineral dan Batubara yang saat ini tengah dibahas oleh Panitia Kerja DPR RI.

"Pemerintah telah mengakomodasi adanya pencadangan negara yang diperuntukkan bagi kepentingan nasional guna menjamin pasokan dalam negeri dan konservasi energi," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro pekan lalu.

Dalam rancangan tersebut, lanjutnya, jika pencadangan negara akan dikembangkan maka pengelolaannya akan diserahkan kepada BUMN pertambangan yang dalam implementasinya bisa bekerja sama dengan pihak swasta nasional maupun asing.

Direktur Pembinaan Usaha Mineral, Batubara dan Panas Bumi pada Departemen ESDM Mangantar S. Marpaung menjelaskan pencadangan negara ditetapkan agar cadangan batu bara dan mineral tidak habis dalam waktu singkat.

"Dulu tahun 1970-an ada wilayah pencadangan negara tapi semua kini sudah masuk kontrak pertambangan dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara [PKP2B], sehingga Indonesia tidak memiliki wilayah pencadangan negara," ujarnya.

Sumber daya dan cadangan terbukti batu bara Indonesia (juta ton)

Pulau	Kalori	Sumber daya	Cadangan terbukti
Jawa	5.100-6.100	19,24	0
	6.100-7.100	2,97	0
Sumatra	5.100-6.100	26,873	2.637
	6.100-7.100	1,781	134
Kalimantan	5.100-6.100	25,376	2.769
	6.100-7.100	6,845	1.219
Sulawesi	5.100-6.100	2,18	0,06
Maluku	5.100	2,13	0
Papua	5.100-6.100	120	0
	6.100-7.100	31	0
<b>Total</b>		<b>61.274</b>	<b>6.759</b>

Sumber: Departemen ESDM, data 2005

Menurut dia, satu wilayah tambang dapat ditetapkan sebagai wilayah pencadangan negara dengan sejumlah alasan antara lain produksi nasional sudah terlampaui berlebih, wilayah tersebut belum memiliki nilai ekonomis saat ditetapkan, dan wilayah hutan lindung.

"Produksi akan dikontrol, dihitung apakah sudah memenuhi seluruh kebutuhan nasional, apakah ekspor sudah cukup memenuhi target devisa. Jika sudah melampaui itu semua, maka akan ditetapkan sebagai cadangan negara."

### Peraturan pemerintah

Marpaung mengatakan jika cadangan negara sudah diundangkan, akan ada peraturan pemerintah (PP) yang akan mengatur lebih detail menyangkut persyaratan penetapan wilayah cadangan negara dan persyaratan pencabutan wilayah pencadangan negara.

"Peraturan pemerintah itu nanti yang akan mengatur bagaimana sebuah wilayah dapat ditetapkan sebagai pencadangan negara, berapa besar wilayah pencadangan negara yang harus ditetapkan dan kapan wilayah pencadangan negara dapat diproduksi," tuturnya.

Dengan adanya undang-undang dan PP yang mengatur pencadangan negara, maka Indonesia dapat mengawasi dengan bijak pengelolaan sumber daya batu bara yang cadangannya saat ini mencapai lebih dari 60 miliar ton. (*dwi.djanuarto@bisnis.co.id*)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE:  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 11

TAHUN 2006

## Panja DPR akan panggil Freeport

BISNIS INDONESIA

JAKARTA: Panitia kerja (Panja) DPR untuk kasus Freeport akan memanggil para pe-tinggi PT Freeport Indonesia guna membicarakan persoalan yang dihadapi perusahaan tambang emas dan perak Amerika Serikat tersebut.

Ketua Panja DPR untuk kasus Freeport Rafiuddin Hamarung mengatakan Panja DPR akan menggelar pertemuan pada 11 Juli 2006 (besok) dengan Freeport.

Dalam pertemuan itu, katanya, akan dibahas berbagai persoalan yang melilit perusahaan tersebut, seperti audit komprehensif laporan keuangan atau pembukuan, pencemaran lingkungan, *community development*, serta peninjauan kembali kontrak karya perusahaan tambang tersebut.

Hingga saat ini, Panja belum bisa mengambil kebijakan karena harus bertemu dengan Freeport terkait dengan hasil kerja Panja.

"Kita belum bisa berandai-andai. Kita harus *clear* dulu, setelah itu baru dihasilkan rekomendasi Panja dengan Freeport," ujar anggota Komisi VII DPR tersebut di Jakarta, pekan lalu.

Namun, dia mengatakan Panja Freeport mendesak perusahaan tambang itu untuk segera diaudit secara komprehensif mengenai laporan keuangan dan pendapatannya, serta perlu dilakukan peninjauan kembali kontrak karya antara pemerintah dengan Freeport.

Seperti diketahui, sebelumnya terungkap jika pendapatan negara yang didapat pemerintah dari Freeport sejak 2000 sampai dengan 2005, lebih rendah US\$304 juta jika dibandingkan dengan laporan setoran yang diklaim Freeport.

Berdasarkan data versi pemerintah yang dilaporkan dalam Sidang Kabinet pada 20 Maret 2006, total penerimaan langsung pemerintah dari Freeport Indonesia sejak 2000 hingga 2005 mencapai US\$2,1 miliar.

Meski demikian, Rafiuddin menilai peninjauan kontrak karya harus berdasarkan kesepakatan bersama dengan Freeport.

"Kontrak karya bisa ditinjau lagi, tapi jika tidak setuju, ya... tidak bisa. Namun, Kontrak karya harus ditinjau lagi terkait dengan pendapatan negara." (K18)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input checked="" type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input checked="" type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN    FEB    MAR    APR    MEI    JUN    JUL    AGST    SEPT    OKT    NOV    DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31											
HALAMAN : <u>11</u>										TAHUN 2006	

### Tambang NNT butuh lahan *stockpile*

MATARAM: Tambang tembaga dan emas PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) Batu Hijau, Kab. Sumbawa akan berhenti beroperasi atau terancam tutup, jika permohonan perluasan areal untuk penumpukan bahan galian tambang (*stockpile*) tidak dikabulkan.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi NTB, I Nengah Sumastra, mengatakan perusahaan itu membutuhkan tambahan lahan 28 hektare untuk perluasan *stockpile*, karena lahan yang tersedia sekarang tidak mampu menampung bebatuan yang volumenya semakin meningkat.

Dia mengatakan pihak NNT sekarang sudah mengajukan permohonan ke Departemen Kehutanan untuk perluasan lahan namun hingga kini belum dikabulkan.

"Kalau permohonan perluasan lahan untuk *stockpile* itu tidak dikabulkan, maka perusahaan pertambangan tembaga dan emas tidak bisa beroperasi atau tutup, karena tidak ada lahan tempat menyimpan bebatuan sebelum diproses menjadi konsentrat," ujarnya, akhir pekan lalu. (ANTARA)

MONITOR BERITA

<input checked="" type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input checked="" type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31											
HALAMAN : TT											TAHUN 2006

### Global Mineral ekspor bijih besi

DHARMASRAYA, Sumbar: Hasil produksi bijih besi galian PT Global Mineral Sejahtera di Jorong Batu Kangkung, Nagari Sungai Limau Kab. Dharmasraya, Sumbar, mulai diekspor untuk pasokan ke China.

Direktur PT Global Mineral Budi Satriadi mengatakan ekspor perdana itu dilaksanakan pekan lalu, setelah segala proses dan perizinan tidak mengalami hambatan.

Sebelumnya ekspor terkendala karena terlambatnya proses penambangan dan pengangkutan terkait pembukaan jalan ke lokasi tambang dan kini kondisi itu telah teratasi.

"Jumlah produksi yang diekspor ke China mencapai 100.000 ton," katanya, akhir pekan lalu.

Sementara itu, untuk pengembangan ke depan ditargetkan minimal 30.000 ton per bulan.

Budi menambahkan terlaksananya pengangkutan bijih besi melibatkan banyak tenaga kerja warga setempat dan membuka peluang jasa angkutan di daerah itu.

Dia mengatakan permintaan bijih besi dari luar negeri cukup banyak, namun belum terlayani semuanya terkait penambangan yang saat ini hanya terfokus pada satu lokasi di Dharmasraya. (ANTARA)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																													
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input checked="" type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	<u>JUL</u>	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN: 7											TAHUN 2006																			

### Lebong Miliki Potensi Panas Bumi Besar

BENGKULU - Kabupaten Lebong, Bengkulu memiliki potensi panas bumi yang cukup banyak besar. "Hasil penelitian yang dilakukan sebuah perusahaan nasional diketahui di perut bumi Lebong terkandung potensi panas bumi cukup banyak. Dalam satu titik di kawasan Danau Liang saja potensinya mencapai 1.000 MW," kata Bupati Lebong Dalhadi Umar di Bengkulu seperti dikutip *Antara*, Jumat (7/7) pekan lalu.

Menurut dia, panas bumi di kawasan Danau Liang yang arealnya mencapai ratusan hektare terdapat beberapa titik potensi panas bumi, juga beberapa tempat lain. "Saya tidak tahu persis jumlah seluruh potensi panas bumi di Lebong, tapi pihak perusahaan yang melakukan penelitian sudah memiliki data riilnya," katanya.

Dia mengatakan, investor nasional yang tengah mengadakan survei itu mengantongi izin prinsip langsung dari PT Pertamina (Persero). Hingga saat ini, pihak perusahaan itu masih menyurvei potensi panas bumi tersebut, guna mencari titik lain. **(lim)**

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input checked="" type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>										
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input checked="" type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	<u>JUL</u>	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9	10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31									
HALAMAN: 18											TAHUN 2006

## Kahayan Banjir, Penambang Emas Liar Marak

**PALANGKARAYA** — Banjir di sekitar daerah aliran sungai (DAS) Kahayan dalam beberapa pekan terakhir menjadi berkah tersendiri bagi puluhan penambang emas di sekitar wilayah tersebut. Sepanjang ruas jalan Palangkaraya-Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, tampak marak oleh puluhan rakit milik penambang emas tanpa izin.

"Dalamnya air sungai memudahkan mesin kami bekerja," kata Demos, 34 tahun, penambang emas di Kecamatan Sepang Simin saat ditemui, Sabtu lalu.

Dia dan kawan-kawannya biasa bekerja berkelompok dengan dua hingga empat rakit, yang masing-masing dioperasikan oleh empat orang. Di rakit itulah para penambang membuat pondok dari menaruh mesin penyedot lumpur yang dilengkapi selang paralon dan selang spiral. Dari endapan lumpur yang mereka sedot, setiap hari bisa terkais sekitar 7 gram emas. Penampung akan menghargai Rp 90 ribu per gram. Setelah dipotong biaya operasi selama sepekan, sisanya dibagi dua antara pemilik peralatan

dan pekerja. "Hasilnya tiap pekerja akan mengantongi Rp 50 ribu per hari," tutur Demos.

Ia mengaku terpaksa melakoni pekerjaan tersebut demi menghidupi keluarga, khususnya untuk menghadapi tahun ajaran baru sekolah bagi anak-anaknya. "Habis mau kerja kayu sekarang ini juga sulit. Banyak operasi yang dilakukan aparat," ujarnya.

Menurut Wakil Bupati Kabupaten Gunung Mas Hambit Bintih, di sepanjang DAS Kahayan, dari Palangkaraya ke Kuala Kurun, terda-

pat sekitar 2.000 penambang emas. Ia berencana akan menempatkan mereka dalam satu tempat, seperti wilayah pertambangan rakyat. "Namun, kami masih mencari lokasi yang cocok dan tentunya menghasilkan bagi penambang," kata Hambit.

Sambil menunggu lokasi yang tepat, dia melanjutkan, para penambang yang tergolong liar itu tak akan diganggu dulu. Apalagi kondisi saat ini sedang susah. "Jadi biarlah dulu masyarakat mencari kerja untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka," ujarnya. ● KARANA WW

45

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input checked="" type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>										
KODE: <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA <input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> MIGAS <input checked="" type="checkbox"/> DAN PANAS BUMI <input type="checkbox"/> UMUM											
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31											
HALAMAN: 12										TAHUN 2006	

## Newmont may close mine if no land for expansion

**P**T Newmont Nusa Tenggara may shut down its copper and gold mine in Sumbawa, West Nusa Tenggara, if its request for additional land for ore stockpiling is turned down by the forestry ministry, a local mining and energy official says.

The head of the West Nusa Tenggara mining and energy office, I Nengah Sumastra, said in Mataram on Saturday that Newmont needed 28-

hectares of additional land for stockpiling because the current available land could no longer contain the increasing volume of the company's unprocessed copper and gold ore.

According to the company's data, 1,400 hectares had been cleared to make way for the company's mining operations.

Sumastra said the company had filed a request for the extra land to the forestry

ministry, however the ministry had not responded.

"If the request for land expansion is turned down, then the copper and gold mining company won't be able to operate or will be closed because there won't be any available land to contain the rocks before they undergo processes to become concentrates," he told *Antara*.

The company had requested permission to clear part of

a protected forest near its mine location for the stockpiling expansion.

According to an existing regulation, all areas of protected forest used for industry must be replanted in an area twice as large as the used area.

Sumastra said that it was difficult to comply with the rule in the Sumbawa regency, because there was not enough land there. (JP/07)

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input checked="" type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>	
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input checked="" type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN <u>JUL</u> AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN : 7		TAHUN 2006

**BATASI EKSPOR RAW MATERIAL**

***Pilot Plant* Pengolahan Mineral Dibangun**

JAKARTA – Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batu bara (Puslitbang tekMIRA) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggagas pendirian *pilot plant* pengolahan mineral terpadu. Melalui proyek ini, diharapkan kelak Indonesia tidak lagi mengekspor mineral dalam bentuk kasar (*raw material*).

Menteri ESDM Purnomo Yusi-giantoro pada Jumat (7/7) secara resmi meletakkan batu pertama pada proyek yang berlokasi di Cipatat Bandung tersebut. Purnomo mengatakan, proyek ini merupakan babak baru untuk meningkatkan pertumbuhan sub sektor mineral di Indonesia.

“Selama ini Indonesia dikenal sebagai eksportir mineral non lo-

gam dalam bentuk material kasar (*raw material, red*). Keberadaan *pilot plant* ini nantinya diharapkan mampu memberikan nilai tambah terhadap bahan material tersebut,” kata Purnomo dalam siaran pers.

Apalagi, kata Purnomo, berbagai produk impor yang masuk ke pasar domestik sebenarnya merupakan hasil rekayasa teknologi yang notabene bukan teknologi canggih, tersedia secara komersial dan sudah dikuasai oleh para peneliti di Indonesia.

Keberadaan *pilot plant* ini, kata Purnomo, sebagai sarana penelitian secara terpadu di bidang pengolahan berbagai jenis mineral, terutama mineral non logam. Keberadaan *pilot plant* ini juga menjadi ajang berkarya bagi para

peneliti Puslitbang tekMIRA.

Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Kewilayahan dan Lingkungan Hidup Marwansyah Lobo Balia mengakui, ekspor *raw material* dari Indonesia ke berbagai negara dilakukan dengan harga yang murah. Namun, Indonesia mengimpor produk dengan harga yang jauh lebih mahal. “Kita tidak sadar bahwa kita sangat *tekor*,” ujar dia.

Disinggung mengenai kesan lambat yang dilakukan oleh Departemen ESDM dalam merealisasikan proyek ini, Lobo mengatakan bahwa sesungguhnya penanganan mineral industri sudah dilimpahkan ke daerah dan tidak lagi ditangani pusat. “Tapi, memang ada berbagai kendala misalnya teknologi, SDM. Karena itu, pelan-pelan kita perbaiki,”

kata Lobo yang merupakan mantan Kepala Puslitbang tekMIRA.

Untuk merealisasikan proyek ini, Puslitbang tekMIRA telah membuat perencanaan yang terdiri atas tiga tahap, pertama penyediaan lahan dan berbagai jenis peralatan dan sarabna pendukungnya. Kedua, pembangunan fisik dan pemasangan peralatan untuk pengolahan mineral kaolin, felspar, bentonit zeolit, pasir besi dan bijih emas dan ketiga pengembangan teknologi pengolahan untuk mineral lainnya, yang akan dilaksanakan pada 2007-2008.

Sebelumnya, Puslitbang tekMIRA juga sudah menghasilkan *pilot plant* batu bara (Coal Technology Center) di Palimanan, Cirebon Jawa Barat. (es)